

Prabowo Kejar Pelaku Serakahnomics

Dari Halaman 1

Ia mengatakan, perilaku rakus yang tak lagi mengindahkan moral, hukum, maupun kepentingan bangsa.

"Serakahnomics ini sudah lewat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah," imbuhnya.

Prabowo prihatin karena meskipun Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, tapi masih banyak pihak yang bertindak seperti maling dan tidak jera meski telah diberi peringatan berulang kali. Ia menyebut para pelaku tersebut tidak lagi bertindak

rasional, melainkan didorong oleh keserakahan yang mengakar.

"Kekayaan kita luar biasa tapi maling-maling pun luar biasa, kalian luar biasa nggak jera-jera, sudah dikasih warning berkali-kali masih aja. Saya sedih mereka-mereka itu menurut saya sudah di arah bukan lagi masuk akal atau apa, mereka ini dalam rangka sudah serakah," ujar Prabowo

Prabowo mewanti-wanti para 'pengikuti mazhab serakahnomics' bahwa dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah disumpah untuk menjalankan Undang-undang Dasar 1945, serta menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa, berilah saya keberanian untuk menegakkan Undang-undang Dasar 1945," ujar Prabowo.

Ia juga menyinggung kerugian negara akibat praktik kejahatan ekonomi yang tembus Rp100 triliun per tahun.

"Rp100 triliun tiap tahun, berarti 5 tahun Rp1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," katanya.

Presiden pun memberi sinyal akan adanya langkah tegas dari pemerintah terhadap praktik ekonomi yang merugikan rakyat dan melanggar hukum. "Tunggu tanggal mainnya," pungkasnya. (cnni/js)

Polisi Tetapkan

Dari Halaman 1

Selain itu, Ditpolairud Polda Sulut juga sementara memeriksa 13 anak buah kapal (ABK). "Untuk yang lainnya sementara dalam pengembangan," ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap nakhoda IB dilakukan atas dugaan awal, penumpang yang ada di KM Barcelona V tidak sesuai dengan manifest. Selanjutnya, diduga tidak berjalannya standar operasional prosedur (SOP) kedaruratan di kapal.

Sebelumnya, korban tewas akibat kebakaran KM Barcelona V di Pulau Talise bertambah menjadi lima orang. Dari lima orang itu, dua di antaranya belum teridentifikasi.

Tiga korban meninggal yang telah teridentifikasi adalah Asna Lapea, Zakaria Tindigulangi, dan Juliana Gumolung. Ketiganya dievakuasi oleh tim Basarna.

Data sementara ada 571 penumpang di atas KM Barcelona V yang terbakar. Tujuh orang merupakan anak buah kapal (ABK). (det/js)

Lima Tentara Israel

Dari Halaman 1

Jumlah tentara yang bunuh diri di Pasukan Pertahanan Israel (IDF) semacam ini telah meningkat sejak beberapa waktu terakhir.

Hingga akhir 2023, tujuh prajurit tewas bunuh diri, diikuti dengan 21 kasus kematian pada 2024 dan 20 kasus pada awal 2025.

Untuk kasus kematian terbaru, yang telah dikonfirmasi pada Minggu (20/7), mencakup imigran berusia 19 tahun asal Norwegia. Ia bergabung dengan IDF kurang dari setahun yang lalu dan masih dalam proses pelatihan.

Beberapa orang lainnya yaitu prajurit Brigade Golani yang menembak dirinya sendiri di pangkalan Sde Teiman dan prajurit cadangan Daniel Edri, yang membakar diri setelah didiagnosis post-traumatic stress disorder (PTSD).

Kasus kematian terbaru juga melibatkan prajurit cadangan yang bertugas aktif, dengan para pejabat militer menyebut insiden itu terjadi akibat trauma pertempuran.

"Kita tidak bisa bernapas lega menghadapi statistik ini," kata pemimpin oposisi Yair Lapid.

"Perang ini juga membunuh mental," tambah dia. IDF juga membenarkan bahwa sejumlah prajurit cadangan ada yang menarik diri dari pertempuran karena mengalami stres.

Menurut Haaretz, jumlah tentara Israel yang bunuh diri karena masalah kesehatan mental ini kemungkinan lebih banyak dari yang tercatat. (cnni/js)

Preseden Hukum yang Mengusik Nalar.....

Dari Halaman 1

kan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 18 Juli 2025, yang menghukum Lembong dengan pidana penjara empat tahun enam bulan terkait kasus impor gula kristal mentah (GKM) tahun 2015, kembali memantik perdebatan mendalam tentang batas antara tindakan kebijakan publik dan yurisdiksi hukum pidana di Indonesia. Lembong dinyatakan bersalah karena menerbitkan izin impor tanpa memperoleh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta tanpa melalui koordinasi antarkementerian. Kebijakan tersebut dinilai lebih menguntungkan pelaku usaha swasta dibandingkan badan usaha milik negara.

Namun, persoalan yang muncul dari vonis ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, melainkan juga menyentuh aspek etika dan landasan yuridis dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat publik. Dalam persidangan, majelis hakim secara terbuka menyatakan bahwa Lembong tidak terbukti memiliki niat jahat (mens rea), suatu unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Tak ditemukan pula indikasi bahwa ia memperoleh keuntungan pribadi atas kebijakan yang ia ambil. Bahkan, selama proses hukum berlangsung, ia dinilai kooperatif, transparan, serta menunjukkan integritas sebagai pejabat yang memiliki rekam jejak bersih. Dengan demikian, pemberian sanksi pidana terhadap pejabat yang melakukan kesalahan administratif

tanpa itikad buruk dan tanpa niat memperkaya diri pribadi dapat menciptakan preseden yang membahayakan sistem hukum.

Dalam kerangka hukum pidana, terlebih berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, unsur kesengajaan atau intensi jahat merupakan elemen utama yang harus dibuktikan. Tidak cukup hanya membuktikan adanya pelanggaran hukum dan akibatnya; harus ada pula kesadaran pelaku untuk merugikan negara atau memperkaya diri sendiri. Oleh sebab itu, jika pengadilan menyatakan bahwa tidak terdapat unsur tersebut, maka kelayakan vonis yang dijatuhkan patut dipertanyakan. Hal ini pula yang menjadi sorotan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, yang melihat adanya ketegangan antara pendekatan hukum yang kaku dan formalistis dengan prinsip keadilan yang lebih substansial.

Konteks politik dalam kasus ini juga tak bisa diabaikan. Tom Lembong dikenal vokal mengkritik sejumlah kebijakan strategis pemerintah, seperti IKN, hilirisasi tambang, dan sentralisasi perizinan. Ia pun aktif dalam tim oposisi pada Pemilu 2024. Karena itu, sebagian pihak mencurigai proses hukumnya sarat muatan politik, atau setidaknya bermuansa pembungkaman terhadap oposisi. Dalam demokrasi, asas praduga tak bersalah dan independensi peradilan wajib dijaga. Namun, kritik atas putusan tetap sah, apalagi jika berdampak membatasi ruang birokrasi dalam merumuskan kebijakan. Jika

pejabat bisa dipidana atas kesalahan administratif tanpa niat jahat dan tanpa keuntungan pribadi, maka birokrasi akan menjadi pasif dan takut bertindak.

Lembong telah menyatakan niatnya untuk mengajukan upaya hukum lanjutan melalui proses banding maupun kasasi—langkah konstitusional yang sah dalam menguji kembali keadilan substansial dari putusan tersebut. Publik pun berkepentingan untuk terus memantau apakah sistem hukum nasional mampu secara jelas membedakan antara kesalahan administratif dengan korupsi yang sesungguhnya. Di harapkan, majelis hakim dalam tingkat banding atau kasasi dapat menilai perkara ini dengan objektif, bebas dari tekanan politik, dan tetap berpegang pada prinsip independensi serta akuntabilitas peradilan. Kedua prinsip ini harus berjalan beriringan: independensi menjaga hakim dari pengaruh luar, sementara akuntabilitas menjamin bahwa setiap putusan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini bukan bentuk pembelaan terhadap individu tertentu, melainkan ajakan untuk menegakkan hukum yang adil, proporsional, dan tidak dijadikan alat untuk menekan kebijakan yang sah. Jika hukum dijadikan instrumen politik, maka yang muncul bukanlah negara hukum, melainkan negara yang diliputi ketakutan, sebab para pembuat kebijakan enggan bertindak dan lebih memilih menghindari tanggung jawab. (*)

Bobby: Masih Perlu Kerja Keras Tingkatkan Level

Dari Halaman 1

Menurut data yang diungkapkan Bobby Nasution, saat ini di Sumut hanya 7,7% UMKM yang mengakses pembiayaan, 19% yang memanfaatkan teknologi, 3% masuk ke ekosistem digital dan 0,08% anak muda yang berwirausaha. Angka ini, menurutnya masih sangat kecil dan perlu kerja keras serta kolaborasi dari seluruh pihak.

"Ini masalah di beberapa daerah Indonesia, perlu kolaborasi kita bersama untuk mengangkat level UMKM kita, karena kita semua sepakat UMKM merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia," kata Bobby Nasution, saat pembukaan Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2025 di Tiara Convention Centre, Jalan Cut Mutia Nomor 1, Medan, Jumat (18/7).

Bobby juga bersyukur, bagaimana Indonesia menganggap UMKM penting sebagai instrumen ekonomi. Saat ini yang penting, menurutnya, bagaimana mengimplementasikan kebijakan

yang mendukung pertumbuhan UMKM.

"Kita di sini sama-sama sepakat UMKM penting untuk ekonomi, sebagai motor penggerak ekonomi, ada negara yang tidak terlalu mengurusi UMKM nya, dibiarkan berjalan otomatis, hanya saja yang kita perlu tinggal implementasinya," kata Bobby.

Deputi Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, untuk meningkatkan level UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, BI, atau instansi lain, tetapi kolaborasi bersama. Destry juga mengakui ini bukan pekerjaan yang mudah dan cepat.

"Naik level itu tidak mudah, misalnya untuk mengakses keuangan UMKM harus mempelajari pembukuan, membuat neraca perdagangan, itu yang perlu kita bina dan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi seluruh pihak yang terlibat, kita perlu kroyokan mengerjakan ini," kata Destry.

Kepala BI Perwakilan Sumut Rudi B Hutabarat memandang UMKM di Sumut terus

berkembang. Tahun ini hingga Juni nilai ekspor UMKM Sumut mencapai Rp49,6 miliar, keterlibatan pihak lain dalam pembinaan meningkat dan lebih sadar akan menjaga lingkungan.

"Ini yang mendorong UMKM kita berdaya saing tinggi dan perlu terus kita tingkatkan, potensinya luar biasa, bahkan dalam waktu dekat kita akan mengeksplor produk UMKM sekitar Rp10 miliar," kata Rudi Hutabarat.

Pembukaan KKSU kali ini dilakukan dengan cara yang sedikit unik, Gubernur Sumut, Deputi BI, Kepala Perwakilan BI Sumut dan Ketua DPRD Sumut menyeduh kopi V60 (salah satu metode menyeduh kopi manual). Mereka juga menyerahkan pembiayaan kepada UMKM binaan BI.

Hadir pada pembukaan ini, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, unsur Forkopimda dan Konsulat Negara Sahabat. Hadir juga beberapa bupati/walikota se-Sumut, jajarwan BI Indonesia dan juga OPD terkait Pemprov Sumut. (A-05)

Prabowo: Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Dari Halaman 1

Bahkan, nilainya melebihi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi (Rosan Roeslani), investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu, APBN 2025. Kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai," ujar Prabowo.

Merujuk data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen. Angka ini memang menurun 0,46 persen poin dibanding Maret 2024, dan turun 0,79 persen poin dibanding Maret 2023.

Secara jumlah, penduduk miskin berkurang menjadi 24,06 juta orang, atau menurun 1,16 juta orang dibanding Maret 2024 dan berkurang 1,84

juta orang dibanding Maret 2023.

Penurunan juga tercatat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan turun menjadi 6,66 persen dari sebelumnya 7,09 persen, sementara di perdesaan turun menjadi 11,34 persen dari 11,79 persen.

Secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan berkurang 0,59 juta orang, dan di perdesaan turun 0,57 juta orang.

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Jumlah penduduk bekerja tercatat 145,77 juta orang atau bertambah 3,59 juta orang dibanding tahun sebelumnya.

Lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tenaga kerja tertinggi adalah sektor perdagangan, dengan kenaikan 0,98 juta pekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76 persen, turun dari 4,82 persen pada Februari 2024. Sementara itu, rata-rata upah buruh nasional naik 1,78 persen menjadi Rp3,09 juta pada Februari 2025.

Adapun data kemiskinan semester I 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sedianya, data kemiskinan dan tingkat ketimpangan dijadwalkan dirilis pada Selasa (15/7) lalu. Namun, BPS menundanya lantaran ingin meningkatkan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.

"Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera," demikian pernyataan resmi BPS terkait penundaan tersebut. (cnni/js)

Pesawat Militer Bangladesh Jatuh

Dari Halaman 1

tersebut, Senin (21/7).

Menurut NDTV, korban tewas terdiri dari 16

siswa, 2 guru, dan satu pilot.

Korban luka sejahat ini telah dilarikan ke rumah sakit dengan sejumlah luka bakar, demikian menurut dokter National Institute of Burn and Plastic Surgery.

Perdana Menteri interim Bangladesh Muhammad Yunus telah menyampaikan belasungkawa atas insiden ini. Ia memerintahkan pihak berwenang menggelgar investigasi. (cnni/js)

Lapangan Merdeka, Simbol Ketidakmerdekaan?

Dari Halaman 1

Dulu, Lapangan Merdeka adalah milik rakyat. Tempat berkumpul tanpa syarat, tanpa undangan, tanpa harga. Di situlah suara rakyat pernah bergema, barisan demonstrasi berderap, dan anak-anak sekolah belajar sejarah bukan dari buku, melainkan dari pengalaman hidup bersama. Ia bukan hanya ruang kosong, tapi panggung rakyat, tempat menyaksikan, bermain, bersantai, dan bermimpi.

Saya masih ingat betul, sekitar awal tahun 1900-an, ketika masih duduk di bangku SMP. Usai upacara 17 Agustus di sekolah, kami beramai-ramai menuju Lapangan Merdeka Medan. Tujuan kami sederhana, ingin menyaksikan devile pasukan ABRI (kini TNI), mendergar dentuman senjata, dan menyerap semangat perjuangan lewat teatrikal yang menggugah.

Saat SMA, saya sering ikut lomba baris-berbaris di tempat itu. Pohon-pohon trembesi yang rindang mengelilingi lapangan, menjadi pelindung setia dari terik matahari. Juga menjadi tempat kami melepas lelah sambil menikmati angin sepoi-sepoi dari dedaunan yang rimbun. Suasana itu menghadirkan relaksasi yang tak

bisa dibeli di pusat perbelanjaan mana pun.

Ketika kuliah, Lapangan Merdeka menjadi titik persinggahan saat menunggu sudako - angkutan kota kecil dengan fasilitas minimal. Di sela waktu, kami menyaksikan penjual obat bak pesulap, permainan catur jalanan yang "menyedot recehan" dari kantong kita, dan pedagang kaki lima dari penjual nira hingga barang pecah belah meramaikan suasananya. Lapangan itu menjadi titik temu berbagai kelas social, semua merasa setara, semua merasa punya ruang.

Namun semua tinggal kenangan. Sejak tahun 2005, saat Wali Kota Medan kala itu, H. Abdillah, menggagas proyek Merdeka Walk, lapangan ini berubah wajah. Rerumputan diganti paving blok, pohon dilucuti, dan suara musik menggantikan gema perjuangan. Akses bebas diganti tarif parkir dan harga menu. Ruang publik itu dikomersialisasi. Lapangan yang dulu bisa dimasuki siapa saja, kini membutuhkan rupiah hanya untuk sekedar duduk.

Sayangnya, banyak yang lupa bahwa fungsi dasar ruang publik bukan untuk belanja, tapi untuk bertemu, berpikir, dan bersuara. Ketika ruang itu diberi pagar tak kasat mata berupa harga kopi, batas waktu parkir, atau minimal order, yang hilang bukan sekedar tempat duduk

gratis, tapi ruang hidup dan kesadaran sejarah itu sendiri.

Kini proyek revitalisasi Lapangan Merdeka, yang digagas Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota, menelan anggaran ratusan miliar. Di saat yang sama, di lorong-lorong kota, rakyat masih bergumul dengan ketimpangan. Rumah berdingding triplek, anak sekolah berseragam tipis, pedagang kecil yang digusur tanpa solusi. Kemiskinan struktural tak bisa disembunyikan oleh mural indah di tembok kota.

Maka, perayaan 17 Agustus bukanlah hanya nostalgia. Ia seharusnya jadi ujian integritas bangsa ini. Apakah kita benar-benar merdeka jika rakyat masih dihimpit harga bahan pokok, ruang hidup yang digusur, dan kebijakan yang berat sebelah?

Lapangan Merdeka kini, - yang tertutup proyek mahal itu, adalah simbol yang sedang berubah fungsi. Ia dulunya panggung rakyat. Kini, lebih mirip panggung kekuasaan. Memoles sejarah agar tampak mengkilap sambil diam-diam menghapus akses rakyat terhadapnya.

Jika ruang publik dibatasi, keadilan dibungkam, dan sejarah dijual dalam paket kuliner, maka pertanyaan ini tentu relevan, bahkan genting: "Untuk siapa kemerdekaan ini?!" (*)



Serakah Sebagai Penyakit Hati

Dari Halaman 1

secara berlebihan. "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (QS. Al-Fajr: 20). Dalam ayat lain, Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai makhluk yang "paling keras kecintaannya kepada harta" (QS. Al-Baqarah: 96). Cinta terhadap harta bukanlah dosa, namun menjadi penyakit jika melampaui batas dan menggerogoti nurani.

Peringatan ini bukan tanpa sebab. Sarakah adalah akar dari banyak kerusakan. Ia melahirkan korupsi, kolusi, eksploitasi, monopoli, hingga pengkhianatan terhadap amanah publik. Kita menyaksikan betapa banyak pejabat, pengusaha, dan bahkan tokoh agama yang jatuh karena tak mampu mengendalikan kerakusan terhadap dunia.

Nabi Muhammad bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah emas. Dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah." (HR. Bukhari-Muslim). Pesan ini menggambarkan bahwa sifat serakah tidak akan pernah mengenal kata cukup. Nafsu manusia tidak bisa dipuaskan dengan menambah, melainkan dengan mengendalikannya.

Di negeri ini, sarakah telah menjalar dalam banyak aspek kehidupan. Korupsi berjemaah terjadi karena kerakusan. Lahan hijau dikorbankan demi bisnis tambang dan properti. Pendidikan dikomersialisasi, layanan publik jadi ajang keuntungan pribadi. Bahkan dalam dakwah, sebagian orang mulai melirik kapitalisasi agama: menjual ayat dan menjadikan mimbar sebagai panggung ekonomi.

Yang lebih menyedihkan, kerakusan kini merasuk dalam cara berpikir generasi muda. Budaya media sosial mendorong citra keberhasilan semu: rumah mewah, mobil mahal, liburan eksklusif—semua menjadi tolok ukur hidup. Tanpa sadar, kita mendorong generasi baru untuk berlomba-lomba meraih materi tanpa merenungkan makna cukup.

Islam menegaskan bahwa kekayaan sejati bukan pada jumlah, tetapi pada keberkahan dan manfaatnya. Nilai qana'ah—merasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang ada—adalah penangkal utama sarakah. Begitu pula dengan sedekah, zakat, dan infak yang secara spiritual membersihkan harta dan jiwa.

Perlu juga ditegaskan, Islam tidak mengharamkan kekayaan. Nabi Muhammad ﷺ dan banyak sahabatnya adalah saudagar sukses. Yang dilarang adalah ketika kekayaan menjadi tujuan hidup, bukan alat ibadah. Ketika kekuasaan diburu untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani umat.

Sudah saatnya kita kembali menata ulang orientasi hidup. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, tetapi hidup dengan kesadaran akan batas, manfaat, dan tanggung jawab. Mendidik anak-anak untuk menghargai usaha, bukan sekadar hasil. Mengajarkan makna cukup, bukan hanya mengejar lebih.

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin dan institusi, kembalinya etika dan spiritualitas dalam kehidupan sosial menjadi kemiscayaan. Jika sarakah adalah penyakit, maka qana'ah, keikhlasan, dan pengabdian adalah obatnya. Bila kerakusan telah membakar moral bangsa, maka ketaatan kepada nilai-nilai agama adalah pemadamnya.

Islam mengajarkan bahwa dunia hanyalah ladang amal, bukan tempat tinggal abadi. Maka siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, pasti akan kecewa. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat, akan hidup dengan tenang.